



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HESTIANA LEONARTI**
2. Jabatan : **PANITERA PENGGANTI**
3. NHK : **758856**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.250.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 325 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
2. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA BENGKULU TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
3. Tanah Seluas 20.539 m2 di KAB / KOTA BENGKULU TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/22 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	64.500.000
1. MOTOR, HONDA D1602N26L2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000		
2. MOTOR, YAMAHA 2P2 JUPITER Z Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
3. MOBIL, SUZUKI KARIMUN ESTILO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.319.500.000

**III. HUTANG****Rp. 500.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 819.500.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.